

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA ORGANISASI PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KETAPANG DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK SEBAGAI
VARIABEL MEDIASI**

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana (S1)

Pada Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Disusun oleh :

Julianita Berthilla Claudya

NPM : 16 04 22833

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

SKRIPSI

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA ORGANISASI PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KETAPANG DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK SEBAGAI
VARIABEL MEDIASI**

Disusun Oleh:

Julianita Berthilla Claudya

NPM: 16 04 22833

Telah dibaca dan disetujui oleh:

Pembimbing

Ign, Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc.

5 Juni 2020

SKRIPSI

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA ORGANISASI PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KETAPANG DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK SEBAGAI
VARIABEL MEDIASI**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Julianita Berthilla Claudya

NPM : 16 04 22833

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal 2 Juli 2020

**dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima
sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat**

Sarjana Ekonomi (S1) Program Studi Akuntansi

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Panitia Penguji

Anggota Panitia Penguji

H. Andre Purwanugraha, SE., MBA.

Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si.

Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc.

Yogyakarta, 2 Juli 2020

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D.



SURAT KETERANGAN

No. 431/J/I

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Kamis, 2 Juli 2020 dengan susunan penguji sebagai berikut:

1. H. Andre Purwanugraha, SE., MBA. (Ketua Penguji)
2. Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si. (Anggota)
3. Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. (Anggota)

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Julianita Berthilla Claudya

NPM : 160422833

Dinyatakan

Lulus Dengan Revisi

Pada saat ini skripsi Julianita Berthilla Claudya telah selesai direvisi dan revisian tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia penguji.

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,

Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA ORGANISASI PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
KETAPANG DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK SEBAGAI
VARIABEL MEDIASI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi penelitian ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 5 Juni 2020

Yang menyatakan



Julianita Berthilla Claudya

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur dan terima kasih atas rahmat dan hidayah kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memberikan berkat-Nya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi. Sehingga tersusunlah skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dengan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Mediasi”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat sarjana ekonomi (S1) pada program studi akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi, saya selaku penulis telah mendapat banyak bantuan, bimbingan, dukungan, dan nasihat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang senantiasa menjaga, menyertai dan memberkati setiap langkah dalam menyelesaikan penulisan skripsi sampai saat ini.
2. Keluargaku untuk Ayahanda Markus Oyen dan Ibunda Ermina Erni serta Yosephina Thenia Kristanti atas segala doa, nasehat, bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran hingga penulis bisa menyelesaikan seluruh tahapan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Budi Suprpto, M.B.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisns Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Kaprodi dan Sekaprodi Akuntansi, para dosen, staf pengajar serta karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisns Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan dalam dunia pendidikan.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, Sekretariat, Bendahara, Kepala UPTD, Para Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kasubbid dan Kasubbag serta Kepala Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yang telah memberikan izin penelitian serta meluangkan waktu untuk mengisi dan memberikan arahan yang bermanfaat bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Teman — teman Asrama Mahasiswi Syantikara Yogyakarta para suster, karyawan, kakak dan adik terkhusus Syantikers angkatan 2016 Stefani, Ika, Jenny, Ayu, Yesi, Lisa, Christin, Dicta, Faulin, Klara, Lia, Fritzie, Zsa-Zsa, Jesie, Agnes, Fani, Gitta, Elwina, Pipi dan Leny yang selalu memberikan semangat dan dukungan bagi penulis dari awal kuliah hingga saat ini.

8. Sahabatku personil “THE KOMPOR” Wynne, Uli dan Anui yang telah setia mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga saat ini.
9. Teman – teman satu perantauan Meti, Yudith, dan Kristy yang telah menyemangati dan menghibur penulis selama masa kuliah.
10. Teman – teman seperjuangan selama masa kuliah di UAJY Kelas K dan teman – teman seluruh Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang saling memberikan bantuan.
11. Teman – teman KKN 76 UAJY Kelompok 03 Semarang, Arum, Nadia, Lian, Falen, Caesar, Robby dan Ardian yang telah memberikan pengalaman dan cerita yang berkesan selama mengabdikan diri satu bulan di Semarang, Pagerharjo, Samigaluh, Kulon Progo.
12. Teman – teman @Paperflo.jogja, *Student Staff* bagian Kemahasiswaan Administrasi dan Akademik UAJY, Komunitas Putra Putri Altar Mahasiswa Gereja Maria Assumta Babarsari, serta Himpunan Mahasiswa Program Studi Akuntansi UAJY yang telah memberikan banyak sekali pengalaman dan berdinamika dalam berorganisasi di Yogyakarta hingga penulis dapat sampai pada titik ini.
13. Teman – teman seperjuangan skripsi bimbingan Bapak Novi terkhusus Arum Wandira yang selalu menyemangati satu sama lain.

14. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu, memberikan doa, saran dan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga penulis sangat membutuhkan masukan dan saran yang bersifat membangun. Besar harapan penulis terhadap skripsi yang telah diselesaikan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 5 Juni 2020

Penulis



Julianita Berthilla Claudya

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu”.

-Amsal 3: 5-6

”Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan”.

-Yeremia 29:11

Skripsi ini dipersembahkan untuk Bapak, Mamak, Adik dan teman – teman yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur ketika Berthi sedang di titik terendah.

DAFTAR ISI

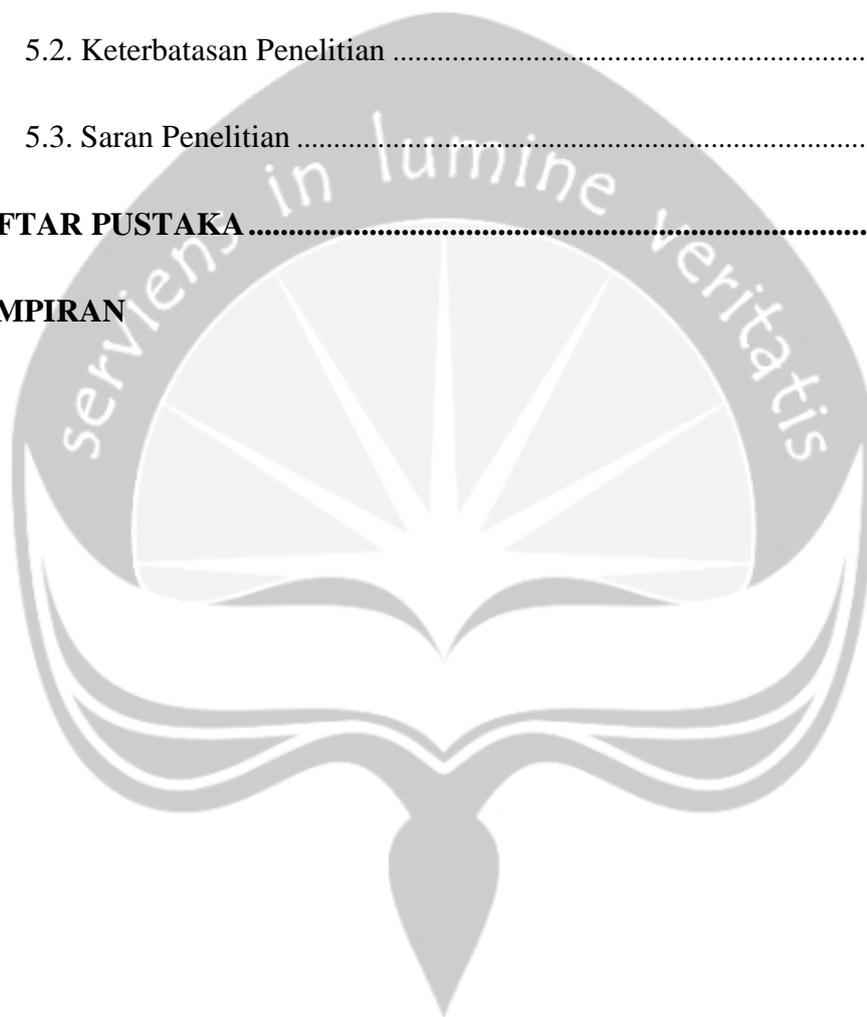
	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	9
2.1. Organisasi Sektor Publik.....	9
2.2. Kinerja Organisasi Sektor Publik.....	9
2.2.1. Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	10

2.2.2. Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik.....	11
2.3. Akuntabilitas Publik.....	13
2.3.1. Pengertian Akuntabilitas Publik.....	13
2.3.2. Dimensi Akuntabilitas Publik.....	14
2.4. <i>Good Governance</i>	16
2.4.1. Konsep Dasar <i>Good Governance</i>	16
2.4.2. Pilar-Pilar <i>Good Governance</i>	16
2.4.3. Tujuan <i>Good Governance</i>	17
2.4.4. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	18
2.4.5. Indikator Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	21
2.5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	23
2.5.1. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	24
2.6. Kerangka Konseptual.....	27
2.6.1. Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap Akuntabilitas Publik.....	27
2.6.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Publik.....	29
2.6.3. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.....	27
2.7. Hasil Penelitian Terdahulu.....	29
2.8. Pengembangan Hipotesis.....	33

2.8.1. Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap Akuntabilitas Publik	33
2.8.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Publik	34
2.8.3. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Organisasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Objek Penelitian.....	37
3.3. Populasi.....	37
3.4. Sampel dan Metode Pengambilan Sampel	38
3.5. Variabel Penelitian	39
3.6. Definisi Operasional Variabel.....	39
3.7. Model Penelitian.....	43
3.8. Jenis dan Metode Pengumpulan Data	43
3.8.1. Jenis Data.....	43
3.8.2. Metode Pengumpulan Data	44
3.9. Analisis Data	44
3.9.1. Statistik Deskriptif.....	45
3.9.2. Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	46
3.9.2.1. Uji Validitas.....	46

3.9.2.2. Uji Reliabilitas.....	47
3.9.3. Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	48
3.9.4. Uji Hipotesis.....	48
3.10. Rencana Pembahasan.....	49
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.....	50
4.2. Penyebaran Kuesioner dan Analisis Demografi Responden	51
4.2.1. Penyebaran Kuesioner	51
4.2.2. Uraian Demografi Responden.....	53
4.3. Pengujian dan Analisis Data	56
4.3.1. Statistik Deskriptif.....	56
4.3.2. Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>)	57
4.3.2.1. Uji Validitas.....	57
4.3.2.2. Uji Reliabilitas.....	68
4.3.3. Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	69
4.3.4. Uji Hipotesis.....	72
4.4. Pembahasan	75
4.4.1. Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap Akuntabilitas Publik	75
4.4.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Publik	77

4.4.3. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.....	82
BAB V PENUTUP.....	82
5.1. Kesimpulan.....	82
5.2. Keterbatasan Penelitian	85
5.3. Saran Penelitian	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

- Tabel 2.1. Tabel Penelitian Terdahulu
- Tabel 3.1. Operasional Variabel
- Tabel 4.1. Penyebaran Kuesioner
- Tabel 4.2. Jenis Kelamin Responden
- Tabel 4.3. Latar Belakang Pendidikan Responden
- Tabel 4.4. Pendidikan Terakhir Responden
- Tabel 4.5. Jabatan Responden
- Tabel 4.6. Lama Bekerja Responden
- Tabel 4.7. Hasil Analisis Statistik Deskriptif
- Tabel 4.8. Hasil Uji Validitas Konvergen (Skor *Loading*)
- Tabel 4.9. *Average Variances Extracted (AVE)*
- Tabel 5.0 Hasil Uji Validitas Diskriminan
- Tabel 5.1. Hasil Uji *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*
- Tabel 5.2. Hasil Pengujian *Goodness of Fit*
- Tabel 5.3. Hasil Koefisien Determinasi *R-Square*
- Tabel 5.4. Hasil Estimasi Koefisien Jalur (*Path Coefficient*)
- Tabel 5.5. Hasil Uji Hipotesis

GAMBAR

Gambar 3.1. Model Penelitian

Gambar 4.1. *Output General SEM Analysis results*

Gambar 4.2. Pengujian Model dengan Warp PLS 7.0



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2. Tabulasi Data Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3. Hasil Statistik Deskriptif
- Lampiran 4. Hasil Uji Validitas Konvergen dan AVE
- Lampiran 5. Hasil Uji Reliabilitas
- Lampiran 6. Hasil Koefisien Determinasi *R-Square*
- Lampiran 7. Hasil Uji *Goodness of Fit*
- Lampiran 8. Hasil Uji *Path Coefficient* dan *P-Values*
- Lampiran 9. Surat Rekomendasi Penelitian

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KINERJA ORGANISASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KETAPANG DENGAN AKUNTABILITAS PUBLIK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI

Disusun Oleh:

Julianita Berthilla Claudya

NPM: 160422833

Pembimbing:

Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc.

Abstrak

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang mendapatkan nilai dibawah “CC” atas hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *good governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan survei kuesioner kepada 30 pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Pengolahan data menggunakan model penelitian analisis SEM berbasis varian (PLS) dengan menggunakan *software* WarpPLS 7.0. Pengujian PLS pada penelitian ini menggunakan evaluasi model pengukuran dengan konstuk reflektif, evaluasi model struktural dengan melihat *R-Square*, pengujian hipotesis, dan uji statistik deskriptif.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh bahwa *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Sedangkan akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

Kata Kunci: *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas Publik, Kinerja Organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah diamanatkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang lebih efektif, efisien dan bertanggungjawab. Pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik secara berkualitas dan transparan melalui tata kelola yang baik. Menurut Mahsun (2015), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi. Dalam organisasi sektor publik, kinerja dapat diukur melalui elemen aparatur pemerintah, sebagai pelaksana pemerintahan yang memiliki tanggungjawab dalam mencapai kinerja yang baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang merupakan salah satu organisasi publik yang bertugas memberikan pelayanan publik yang baik dan layak kepada masyarakat. Masalah-masalah dalam pelayanan publik khususnya administrasi ini pun sering muncul karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang berhubungan langsung dengan semua masyarakat dalam memberikan pelayanan publik mulai dari e-KTP,

kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, surat nikah dan surat-surat kependudukan lainnya. Hasil evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Ketapang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih mendapatkan nilai dibawah “CC” (ketapangkab.go.id). Hal ini memberikan gambaran bahwa akuntabilitas kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang masih belum optimal dan perlu perbaikan.

Perolehan predikat “CC” dalam penilaian tersebut tidak terlepas dari implementasi *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang belum optimal. Menurut Mardiasmo (2009) *good governance* merupakan konsep pendekatan yang berorientasi kepada pelayanan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam indikator upaya partisipasi masyarakat, taat hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis. Implementasi prinsip-prinsip *good governance* di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang masih mengalami hambatan atau kendala. Hal ini dilihat efektivitas dan efisiensi kurangnya pegawai dan fasilitas atau sarana dan prasarana dalam menunjang pembuatan e-KTP menimbulkan pelayanan yang terkesan lambat dan masyarakat yang dilayani juga kurang, sehingga berdampak pada lemahnya partisipasi masyarakat dalam membuat e-KTP. Data menunjukkan bahwa dari 576.556 jiwa masyarakat Kabupaten Ketapang yang wajib melakukan perekaman e-KTP ialah sebanyak 403.000 jiwa, yang sudah melakukan rekam data kependudukan sekitar 300.000 jiwa dan sisanya masih belum memiliki e-KTP. (ketapangkab.go.id).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan temuan pemeriksaan APIP yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2006 sampai dengan semester II tahun 2019, kelemahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang salah satunya adalah belum maksimalnya penerapan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing unit kerja (bpkp.go.id).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagai organisasi publik yang bertugas memberikan pelayanan yang baik dan layak kepada masyarakat, tentunya telah berusaha untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan memperbaiki kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Upaya perbaikan kinerja saat ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya surat himbauan secara tertulis Nomor: 470/156/Disdukcapil/2019 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk segera melakukan pembuatan e-KTP dan surat kependudukan lainnya dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan percepatan kepemilikan KTP (dukcapil.ketapangkab.go.id). Selain itu untuk mewujudkan tercapainya kinerja, pemerintah juga membutuhkan suatu sistem yang

dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sistem pengendalian di Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17 tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Ketapang, dimana penerapan SPIP tersebut diawasi secara rutin oleh Inspektorat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang sebagai organisasi sektor publik dituntut pula untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Tata kelola yang baik dihasilkan oleh penerapan transparansi dan akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2018) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku pemerintahan untuk bertanggungjawab dan menjamin tercapainya tujuan organisasi (Halim dan Syam, 2014).

Upaya-upaya perbaikan kinerja diatas dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 41 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ketapang tahun 2016 – 2021, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja melalui indikator peningkatan tata kelola pemerintah yang baik dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang matang pada setiap instansi. Adanya upaya perbaikan dan peningkatan kinerja yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang ini, selaras pula

dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurbaeti dan Nugraha (2019) yang menyatakan bahwa *good governance* dan sistem pengendalian internal mempengaruhi kinerja. Damayanti (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Noviyana dan Pratolo (2018) menemukan hasil bahwa akuntabilitas merupakan variabel *intervening* antara sistem pengendalian intern pemerintah dan motivasi kerja terhadap kinerja instansi pemerintah. Serta Nasir dan Gunawan (2019) dan Kurniawan (2014) yang menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap akuntabilitas.

Walau demikian, hasil temuan Damayanti (2017) dan Sutirah (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja. Penelitian terdahulu menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja dan dapat menjadi variabel perantara, yakni penelitian Noviyana dan Pratolo (2018) menemukan hasil bahwa SPIP berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah melalui akuntabilitas publik sebagai variabel *intervening* dan Damayanti (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan variabel akuntabilitas publik sebagai variabel perantara antara faktor *good governance*, dan sistem pengendalian intern pemerintah, terhadap kinerja organisasi. Penggunaan akuntabilitas sebagai variabel perantara karena akuntabilitas akan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku pemerintahan untuk bertanggungjawab dan menjamin tercapainya tujuan organisasi (Halim dan Syam, 2014). Serta adanya Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib melakukan implementasi akuntabilitas dalam rangka peningkatan

kinerja. Berdasarkan permasalahan dan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dengan Akuntabilitas Publik sebagai Variabel Mediasi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih memiliki masalah dalam pelayanan publik khususnya administrasi yang berhubungan langsung dengan semua masyarakat dalam memberikan pelayanan publik mulai dari e-KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, surat nikah dan surat-surat kependudukan lainnya. Hasil evaluasi atas laporan kinerja tahun 2018 juga menunjukkan bahwa dari 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih mendapatkan nilai dibawah “CC” (ketapangkab.go.id). Hal ini memberikan gambaran akuntabilitas kinerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang masih belum optimal. Hal ini tidak terlepas dari implementasi *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang belum optimal. Nurbaeti dan Nugraha (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan *good governance* mempengaruhi kinerja instansi. Namun, beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa terdapat variabel yang tidak berpengaruh terhadap kinerja, sehingga memungkinkan ada variabel lain yang dapat menjadi perantara antara faktor, *good governance*, SPIP dan kinerja. Noviyana dan Pratolo (2018) dan Damayanti (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah. Penelitian terdahulu juga menemukan adanya hubungan positif antara *good*

governance dan SPIP terhadap akuntabilitas (Nasir dan Gunawan, 2019; Kurniawan, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini akan menambahkan variabel akuntabilitas sebagai faktor perantara antara faktor *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah, terhadap kinerja organisasi. Peneliti ingin menguji apakah terdapat peran ke-tiga faktor tersebut terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Good Governance* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik ?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik ?
3. Apakah Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Ketapang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor *good governance*, sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas publik terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Kontribusi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah serta akuntabilitas publik terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, sehingga dapat menjadi sumber referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya pada objek yang berbeda.

2. Kontribusi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi aparatur pemerintah atau sumber daya manusia yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam memahami penerapan *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah serta peran akuntabilitas publik agar dapat meningkatkan kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Di Indonesia, berbagai organisasi dalam cakupan sektor publik antara lain badan-badan pemerintah seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejumlah perusahaan di mana pemerintah mempunyai saham (BUMN dan BUMD), organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan dan organisasi massa (Mahsun, 2015). Secara kelembagaan, wilayah publik meliputi organisasi non laba pemerintahan dan organisasi non laba nonpemerintahan. Badan-badan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah lainnya, merupakan bentuk organisasi pemerintah. Sedangkan bentuk organisasi non laba non pemerintahan ialah organisasi sukarelawan, rumah sakit swasta, sekolah tinggi dan universitas swasta, yayasan, LSM, BUMN.BUMD, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan lain sebagainya (Renyowijoyo, 2012).

2.2. Kinerja Organisasi Sektor Publik

Membahas mengenai kinerja tentu tidak terlepas dari beberapa teori yang berhubungan dengan kinerja sebagaimana diuraikan berikut ini. Kinerja ialah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program atau kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang

tertuang dalam sebuah skema strategi (Bastian, 2006). Sedangkan menurut Mahsun (2015) kinerja didefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, nilai organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* organisasi. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas. Kinerja dapat diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target yang hendak dicapai (Mahsun, 2015).

2.2.1. Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Oleh karena sifat dan karakteristiknya yang unik, maka organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya tingkat laba, efisiensi dan juga ukuran finansial. Bastian (2006) mengatakan bahwa indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mahsun (2015) kinerja sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain:

1. Kelompok masukan (*input*) ialah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok proses (*process*) ialah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. Kelompok keluaran (*output*) ialah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
4. Kelompok hasil (*outcome*) ialah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat (*benefit*) ialah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok dampak (*impact*) ialah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

2.2.2. Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Tercapainya tujuan lembaga atau organisasi dapat dikatakan salah satu wujud dari keberhasilan suatu lembaga atau organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, keberhasilan tersebut tidak dapat dilihat begitu saja, diperlukan penilaian terhadap kinerja lembaga atau organisasi tersebut. Halim dan Syam (2014) menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolok ukur kinerja keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Bastian (2006) mengemukakan bahwa pengukuran dan pemanfaatan penilaian kinerja akan mendorong pencapaian tujuan organisasi dan akan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus. Secara rinci,

Mardismo dalam Halim dan Syam (2014) menyebutkan beberapa manfaat disusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengalaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Berdasarkan tujuan dan manfaat diatas pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu (Mardiasmo, dalam Halim dan Syam, 2014):

1. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, maksudnya pemerintah berfokus pada tujuan dan organisasi dalam memberikan pelayanan publik.

2. Ukuran kinerja digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.3. Akuntabilitas Publik

2.3.1. Pengertian Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab dan untuk apa organisasi (atau pekerja individu) bertanggungjawab. Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2015). Akuntabilitas merupakan salah satu pilar *good governance* yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pelayanan publik yang diberikan (Dwipayana dan Eko, 2003).

Halim (2004) memberikan pengertian mengenai akuntabilitas sebagai berikut:

“Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) pengertian akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.”

Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2018) terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

2.3.2. Dimensi Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2018) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berbiaya murah.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Oleh karena itu, indikator yang digunakan pada variabel akuntabilitas publik dalam penelitian ini adalah indikator terkait akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan.

2.4. Good Governance

2.4.1. Konsep Dasar Good Governance

World Bank dalam Mardiasmo (2009) memberikan pengertian tentang *good governance* sebagai konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. Sementara Dwipayana dan Eko (2003) secara rinci menjelaskan *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab serta efisien dan efektif. Menurut pandangan dari *United National Development Program* (UNDP) dalam Sedarmayanti (2012), *governance* (pemerintah) dikatakan baik (*good*) apabila sumber daya publik dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien, yang merupakan respon dari kebutuhan masyarakat. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara (Mardiasmo, 2018).

2.4.2. Pilar-Pilar Good Governance

Menurut World Bank dalam Mardiasmo (2018) terdapat tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan *good governance* yaitu:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial;
2. Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan atas HAM, kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan pendapat atau aspirasi masyarakat;

3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberikan amanah puas dan bila ada atau tidak puas dapat kena sanksi.

2.4.3. Tujuan *Good Governance*

Agung (2005) mengungkapkan tujuan dari diterapkan *good governance* dalam pemerintahan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, efektif dan efisien, transparan, serta akuntabel. Dalam Peraturan Menteri Negataara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tujuan dari *good governance* adalah:

1. Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindakan penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya).
3. Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

4. Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.
5. Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

2.4.4. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Mardiasmo (2018) mengungkapkan bahwa, karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pelaksanaan *good governance*, meliputi:

1. Partisipasi masyarakat (*participation*)

Masyarakat dilibatkan dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip ini mendorong agar semua masyarakat mau memberikan hak suara dalam pengambilan keputusan baik itu melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah maupun yang telah ditetapkan. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul, mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Dengan dilibatkannya masyarakat dan turut serta dalam proses tersebut, maka itulah yang disebut adanya pemikiran yang demokratis.

2. Tegaknya supremasi hukum (*rule of law*)

Penegakan hukum yang adil dan dilaksanakann tanpa pandang bulu. Semua yang telah diatur dalam hukum tidak ada yang diistimewakan, semua harus sama dimata hukum. Dalam prinsip ini juga termasuk didalamnya hukum yang terkait dengan hak asasi manusia.

3. Transparansi (*transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Informasi yang tersedia harus memadai dalam arti memberikan sesuai kepentingan yang dibutuhkan agar mudah dimengerti dan dipantau. Pemberian informasi yang transparan akan menciptakan kepercayaan yang timbul antara pemerintah dan masyarakat melalui kemudahan dalam mengakses informasi.

4. Daya tanggap (*responsiveness*)

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*. Selain lembaga yang memberikan pelayanan dengan respon yang cepat, proses pemerintahan pun harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan dengan baik.

5. Berorientasi pada konsensus (*consensus orientation*)

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tata pemerintahan yang baik harus mampu menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok

masyarakat, dan bila mungkin konsesus dalam hal ini kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Dalam hal ini harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat luas.

6. Kesetaraan (*equity*)

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Memberikan kesempatan bagi setiap warga masyarakat dalam mensejahterakan kehidupannya.

7. Efektivitas dan efisiensi (*efficiency and effectiveness*)

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan bertanggung jawab. Harus ada pengawasan agar tercapai sebuah efektivitas dan efisiensi yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

8. Akuntabilitas (*accountability*)

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan dengan melaporkan setiap kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak-pihak terkait. Para pengambil keputusan bertanggung jawab baik kepada lembaga maupun organisasi yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan masing-masing pihak berbeda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan jenis organisasi bersangkutan. Agar apa yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dipantau juga oleh para pemangku kepentingan.

9. Visi Strategis (*strategic vision*)

Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh kedepan. Setiap kegiatan yang direncanakan harus memiliki tujuan yang jelas bagi masyarakat. Para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta memiliki kepekaan apa yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang, sehingga prinsip ini harus berorientasi bagi cita-cita masa depan.

2.4.5. Indikator Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* tentu harus ada sebuah ukuran atau indikator untuk mengetahui mengapa prinsip tersebut dikatakan sudah diterapkan. Berikut adalah indikator prinsip-prinsip *good governance* menurut LAN (2003):

1. Partisipasi
 - a. Intensitas dan keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan.
 - b. Keterlibatan masyarakat dalam memonitor penyelenggaraan pemerintahan.
2. Taat hukum
 - a. Kualitas pelaksanaan penegakkan hukum.
 - b. Ketersediaan dasar hukum.
3. Transparansi
 - a. Ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi publik.

- b. Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi.
4. Daya tanggap
 - a. Ketersediaan dan kejelasan mekanisme dan prosedur pengaduan.
 - b. Kecepatan dan ketepatan Pemda dalam menanggapi pengaduan.
5. Berorientasi pada konsesus
 - a. Berkembangnya ekonomi masyarakat
 - b. Terjaminnya iklim kompetisi yang sehat
6. Kesenjangan
 - a. Ketersediaan jaminan semua orang untuk mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan.
 - b. Kualitas pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan yang tidak diskriminatif.
7. Efektivitas dan efisiensi
 - a. Tingkat ketepatan pemberian pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Tingkat efisiensi jalannya pemerintahan.
8. Akuntabilitas
 - a. Akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan.
 - b. Pertanggungjawaban kinerja.
9. Visi strategis
 - a. Kejelasan arah pembangunan daerah yang direncanakan.
 - b. Konsistensi kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi.

Oleh karena itu, indikator yang digunakan pada variabel *good governance* dalam penelitian ini adalah indikator terkait dengan partisipasi, taat hukum,

transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efisien dan efektif, akuntabilitas dan visi strategis.

2.5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) dalam Boynton *et al* (2002) pada tahun 1994 menerbitkan *Internal Control-Integrated Framework* yang menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan pengendalian aktivitas perusahaan yang dilakukan pimpinan agar tercapainya tujuan secara efisien, yang terdiri dari kebijakan prosedur. COSO menyebutkan, terdapat lima komponen pengendalian internal yang harus diterapkan untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan pengendalian internal, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai berikut:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

2.5.1. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Unsur-unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Pimpinan instansi pemerintah dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Hal pertama dilakukan berkaitan dengan pengendalian internal dalam sub ini yaitu melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan sarannya, serta kesesuaian dengan tujuan strategi yang ditetapkan. Setelah penetapan tujuan telah dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah melakukan identifikasi risiko atas risiko internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan

pencapaian tujuan tersebut, kemudian menganalisis risiko yang mungkin terjadi serta dampak yang mungkin ditimbulkan mulai dari yang tertinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah. Berdasarkan penilaian risiko diatas, selanjutnya dilakukan respon atas risiko dan membangun kegiatan pengendalian yang tepat.

3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah menurut PP Nomor 60 tahun 2008 dapat berupa:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
- b. Pembinaan sumber daya manusia.
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.
- d. Pengendalian fisik atas aset.
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja.
- f. Pemisahan fungsi.
- g. Otoritas atas transaksi dan kejadian penting.
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya.
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.

k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mendefinisikan informasi sebagai data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat. Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Publik

Dwipayana dan Eko (2003) menjelaskan *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif. Agung (2005) mengungkapkan tujuan dari diterapkan *good governance* dalam pemerintahan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, efektif dan efisien, transparan, serta akuntabel. Akuntabilitas merupakan salah satu pilar *good governance* yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggungjawaban terhadap pelayanan publik yang diberikan (Dwipayana dan Eko, 2003). Maka pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasar prinsip-prinsip *good governance* sehingga mampu memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akurat, maka visi dan misi serta tujuan pemerintah dapat tercapai.

2.6.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Publik

Halim (2004) menyatakan bahwa untuk mendukung akuntabilitas dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian ekstern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Teori COSO mengemukakan salah satu komponen pengendalian yakni pemberian informasi dan komunikasi sebagai wujud tanggung jawab pengendalian intern. Manajemen membutuhkan informasi yang relevan, begitupula dengan masyarakat sebagai penerima layanan juga

membutuhkan informasi yang berkualitas. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas sehingga terjalannya komunikasi yang terus-menerus (Boynton, *et al.*, 2002). Melalui terwujudnya sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah yang bertanggungjawab maka tata kelola pemerintah daerah yang baik akan tercapai yang ditandai dengan tercapainya visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah.

2.6.3. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang

Halim dan Syam (2014) menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolok ukur kinerja keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Hal ini didukung secara tertulis dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dengan adanya pelaporan akuntabilitas kinerja melalui laporan kinerja sebagai wujud realisasi implementasi akuntabilitas di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang lebih bertanggungjawab dan lebih berdaya guna. Akuntabilitas mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku pemerintahan untuk bertanggungjawab dan menjamin tercapainya tujuan organisasi (Halim dan Syam, 2014). Kinerja organisasi pemerintah daerah yang dilihat dari laporan kinerja, akan memperlihatkan sejauh mana organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menegaskan dengan adanya akuntabilitas publik, organisasi pemerintah daerah

memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja organisasi pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal, dengan demikian akuntabilitas publik mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah daerah.

2.7. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu menjadi acuan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian jika dibandingkan telah memiliki hasil yang sama. Namun, ada pula beberapa penelitian yang memiliki hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Nurbaeti dan Nugraha (2019) meneliti tentang “Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Implikasinya Pada Pelayanan Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Garut)”, hasil penelitian menemukan bahwa *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kinerja aparatur pemerintah daerah terhadap pelayanan publik.

Walaupun demikian, ada beberapa penelitian menunjukkan hasil bahwa ada faktor yang tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja, yaitu penelitian oleh Damayanti (2017) tentang “Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah” (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang) menemukan hasil bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah, pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap

kinerja instansi pemerintah, dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas menemukan bahwa terdapat variabel yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap kinerja, sehingga memungkinkan ada variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja yang dapat menjadi perantara antara faktor, *good governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan kinerja. Penelitian oleh Noviyana dan Pratolo (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel *Intervening*” (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten), menemukan hasil bahwa Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah OPD Kabupaten Klaten melalui Akuntabilitas Publik sebagai variabel *intervening*. Nasir dan Gunawan (2019) meneliti tentang “Implementasi *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat), menyatakan bahwa Implementasi *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja berpengaruh positif signifikan. Kurniawan (2014) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan *Good Governance Government* Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat)”, hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen berpengaruh positif terhadap performa manajerial. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa *good*

governance yang baik pada Instansi pemerintah berdampak positif terhadap akuntabilitas instansi pemerintah.

Tabel 2.1.

Penelitian Tedahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Nurbaeti dan Nugraha (2019)	Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Implikasinya Pada Pelayanan Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Garut)	Variabel independen: X1: <i>Good Governance</i> X2: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Variabel dependen: Y: Pelayanan publik Variabel <i>intervening</i> : Z : Kinerja aparatur pemerintah daerah	1. <i>Good Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah 3. Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik
2.	Damayanti (2017)	Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Instansi Pemerintah” (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang)	Variabel independen: X1: Pengendalian Intern X2: Pemanfaatan Teknologi Informasi X3: Akuntabilitas Publik Variabel dependen: Y: Kinerja Instansi Pemerintah	1. Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Publik berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
3.	Noviyana dan Pratolo (2018)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja	Variabel independen: X1:	1. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

		terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel <i>Intervening</i> ” (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten)	Sistem Pengendalian Intern X2: Motivasi Kerja Variabel dependen: Y: Kinerja Instansi Pemerintah Variabel <i>Intervening</i> : Z: Akuntabilitas Publik	2. Motivasi Kinerja berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah 3. Akuntabilitas Publik mampu memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
4.	Nasir dan Gunawan (2019).	Implementasi <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)	Variabel independen: X1: <i>Good Governance</i> X2: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Variabel dependen: Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. <i>Good Governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5.	Kurniawan (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance Government</i> Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat)	Variabel independen: X: <i>Good Governance</i> Variabel dependen: Y: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. <i>Good Governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Penelitian terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Publik

Dwipayana dan Eko (2003) menjelaskan *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif. Agung (2005) mengungkapkan tujuan dari diterapkan *good governance* dalam pemerintahan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, efektif dan efisien, transparan, serta akuntabel. Akuntabilitas merupakan salah satu pilar *good governance* yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan publik, dalam hal ini sebagaimana pertanggungjawaban terhadap pelayanan publik yang diberikan (Dwipayana dan Eko, 2003). Maka pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasar prinsip-prinsip *good governance* sehingga mampu memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan akurat, maka visi dan misi serta tujuan pemerintah dapat tercapai.

Hasil penelitian Nasir dan Gunawan (2019) dan Kurniawan (2014) menyatakan bahwa implementasi *Good Governance* dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₁ : *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik

2.8.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas Publik

Halim (2004) menyatakan bahwa untuk mendukung akuntabilitas dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian ekstern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Teori COSO mengemukakan salah satu komponen pengendalian yakni pemberian informasi dan komunikasi sebagai wujud tanggung jawab pengendalian intern. Manajemen membutuhkan informasi yang relevan, begitupula dengan masyarakat sebagai penerima layanan juga membutuhkan informasi yang berkualitas. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas sehingga terjalannya komunikasi yang terus-menerus (Boynton, *et al.*, 2002). Melalui terwujudnya sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah yang bertanggungjawab maka tata kelola pemerintah daerah yang baik akan tercapai yang ditandai dengan tercapainya visi dan misi serta tujuan instansi pemerintah.

Hasil penelitian Nasir dan Gunawan (2019) dan Noviyana dan Pratolo (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik

2.8.3. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Organisasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang

Halim dan Syam (2014) menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolok ukur kinerja keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Hal ini didukung secara tertulis dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dengan adanya pelaporan akuntabilitas kinerja melalui laporan kinerja sebagai wujud realisasi implementasi akuntabilitas di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang lebih bertanggungjawab dan lebih berdaya guna. Akuntabilitas mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku pemerintahan untuk bertanggungjawab dan menjamin tercapainya tujuan organisasi (Halim dan Syam, 2014). Kinerja organisasi pemerintah daerah yang dilihat dari laporan kinerja, akan memperlihatkan sejauh mana organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini menegaskan dengan adanya akuntabilitas publik, organisasi pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja organisasi pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal, dengan demikian akuntabilitas publik mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah daerah.

Hasil penelitian Damayanti (2017) dan Noviyana dan Pratolo (2018) menyatakan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap Kinerja Organisasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dan analisa dari pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. *Good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien positif dan nilai *p-value* <0,001. Semakin tinggi penerapan prinsip-prinsip *good governance* akan meningkatkan akuntabilitas aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang baik dan tercapainya tujuan organisasi.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien positif dan nilai *p-value* <0,001. Kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan kepada seluruh pegawai melalui lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi, dan pemantauan mendukung penyelenggaraan pemerintah akan mendukung pemerintahan yang bertanggungjawab sehingga dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

3. Akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien positif dan nilai *p-value* <0,001. Organisasi pemerintah daerah yang memiliki akuntabilitas akan mampu memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga mendukung tercapainya visi dan tujuan organisasi, maka kinerja organisasi pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal maupun pihak eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka penelitian ini dapat menjawab tujuan penelitian secara keseluruhan yaitu bahwa kinerja organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang dipengaruhi oleh faktor *good governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan akuntabilitas publik. Berdasarkan jawaban responden atas pernyataan yang diajukan dalam kuesioner hampir semua menyetujui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah menerapkan *good governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan akuntabilitas publik. Melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan adanya akuntabilitas publik akan mampu meningkatkan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Namun, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang juga perlu memberi perhatian lebih terkait kendala yang ada, seperti terdapat target kinerja yang belum tercapai dengan sempurna, proses pengendalian terkait otorisasi pihak berwenang terhadap transaksi dan aktivitas memang masih belum berjalan baik, serta

rendahnya kepatuhan terhadap penerapan peraturan yang telah disepakati oleh pimpinan dan pegawai pada organisasi, karena kurangnya kedisiplinan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Dengan kondisi ini terkait pelaksanaan program dan pencapaian target di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, maka perlu menetapkan kebijakan dan program kegiatan tahun berikutnya agar dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga upaya perbaikan serta komitmen peningkatan kinerja demi terwujudnya *good governance* dapat tercapai dengan baik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang juga perlu membuat kebijakan yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi dan pengelolaan dokumen atas terlaksananya setiap aktivitas dan transaksi dalam organisasi. Setiap aktivitas dan transaksi yang terjadi dicatat melalui prosedur pencatatan tertentu, sehingga menjamin ketelitian dan keandalan data yang dihasilkan. Serta terkait masalah kepatuhan terhadap penerapan peraturan di lingkungan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, maka perlu untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai melalui kewajiban mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dan bila perlu memberi sanksi bila terjadi pelanggaran untuk periode selanjutnya. Dengan adanya kedisiplinan yang baik, semangat kerja, efisien dan efektivitas kerja yang meningkat, akan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian maka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang masih perlu untuk menerapkan *good governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan akuntabilitas publik lebih optimal, agar kinerja dapat ditingkatkan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan yang dimiliki penelitian ini adalah:

1. Karena peneliti memiliki keterbatasan waktu dan kondisi yang tidak mendukung saat penyebaran kuesioner sehingga peneliti hanya meninggalkan kuesionernya kepada responden. Karena penelitian ini menggunakan kuesioner responden dapat menilai sendiri kinerjanya, yang berdampak pada jawaban responden yang kurang bisa menggambarkan fenomena yang sebenarnya.

5.3. Saran Penelitian

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Hasil R^2 sebesar 0,51 mengindikasikan bahwa terdapat 49% variabilitas akuntabilitas publik yang dijelaskan variabel lain diluar model penelitian ini. Hasil R^2 sebesar 0,18 juga mengindikasikan bahwa terdapat 82% variabilitas kinerja organisasi yang dijelaskan variabel lain diluar model penelitian. Sehingga, hal ini mengindikasikan terdapat peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menggali variabel-variabel lain yang diduga mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas dan kinerja organisasi pemerintah.
2. Dalam penerapan *good governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan akuntabilitas publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang telah berlangsung baik. Namun, terkait pelaksanaan program dan pencapaian target Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang perlu

menetapkan kebijakan dan program kegiatan tahun berikutnya agar dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien, serta adanya kebijakan yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi dan pengelolaan dokumen atas terlaksananya setiap aktivitas dan transaksi dalam organisasi, agar kinerja dapat ditingkatkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, K. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., dan Kell, W. G. (2002). *Modern Auditing*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Damayanti, S. (2017). *Pengaruh Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Dwipayana, A., dan Eko, S. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute of Research and Empowerment (IRE).
- Ghozali, I., dan Latan, H. (2015). *Partial Least Squares, Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ghozali, H. I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. dan Syam, K.M. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, J. (2011). *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling Berbasis Varian Dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hartono, J. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Keenam. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Hartono, J., dan Abdillah, W. (2015). *Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Kurniawan, R. A. (2014). *Pengaruh Penerapan Good Governance Government Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat)*. Disertasi. Universitas Widyatama.

Lembaga Administrasi Negara. (2003). *SANKRI Buku I Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Mahsun, M., Sulistiyowati, F., dan Purwanugraha, H. A. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

_____. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Nasir, A., dan Gunawan, A. (2019). Implementasi *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 10(1), (pp. 760-766).

Nurbaeti, T., dan Nugraha, D. S. (2019). Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Implikasinya Pada Pelayanan Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Garut). *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* 10 (1), (pp. 1299-1311).

Noviyana, R. A., dan Pratolo, S. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Akuntabilitas

Publik sebagai Variabel *Intervening*: Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(2).

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kabupaten Ketapang*.

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 41 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Bupati Ketapang Nomor 73 Tahun 2016 tentang *Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Ketapang tahun 2016 – 2021*.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang *Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara*.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Renyowijoyo, M. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Sektor Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik*. Bagian Kedua Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju.

Sholihin, M., dan Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Referensi Internet :

<https://ketapangkab.go.id/2020/01/22/49-opd-terima-piagam-sakip/>. Diakses tanggal 14 Februari 2020.

<https://ketapangkab.go.id/wp-content/uploads/2019/04/Himbauan-Disdukcapil>. Diakses tanggal 27 April 2020.

<https://ketapangnews.com/2019/05/disdukcapil-ketapang-lakukan-perekaman-e-ktp-dipontianak/>. Diakses tanggal 27 April 2020.

<http://www.bpkp.go.id/berita/read/23407/0/Optimalkan-Maturitas-SPIP-di-Kabupaten-Ketapang.bpkp>. Diakses tanggal 27 April 2020.





Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

di tempat

Bersama ini saya:

Nama : Julianita Berthilla Claudya

NPM : 160422833

Status : Mahasiswa Strata (S1), Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir (skripsi) program sarjana, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, saya memerlukan informasi-informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan dengan judul “Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kinerja Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang dengan Akuntabilitas Publik sebagai Variabel Mediasi”.

Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i ikut berpartisipasi dalam penelitian saya ini dengan mengisi kuesioner yang terlampir. Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i mengisi kuesioner ini sangat menentukan keberhasilan penelitian yang saya lakukan. Perlu Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui sesuai etika dalam penelitian ini, data yang saya peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan semata-mata untuk kepentingan penelitian.

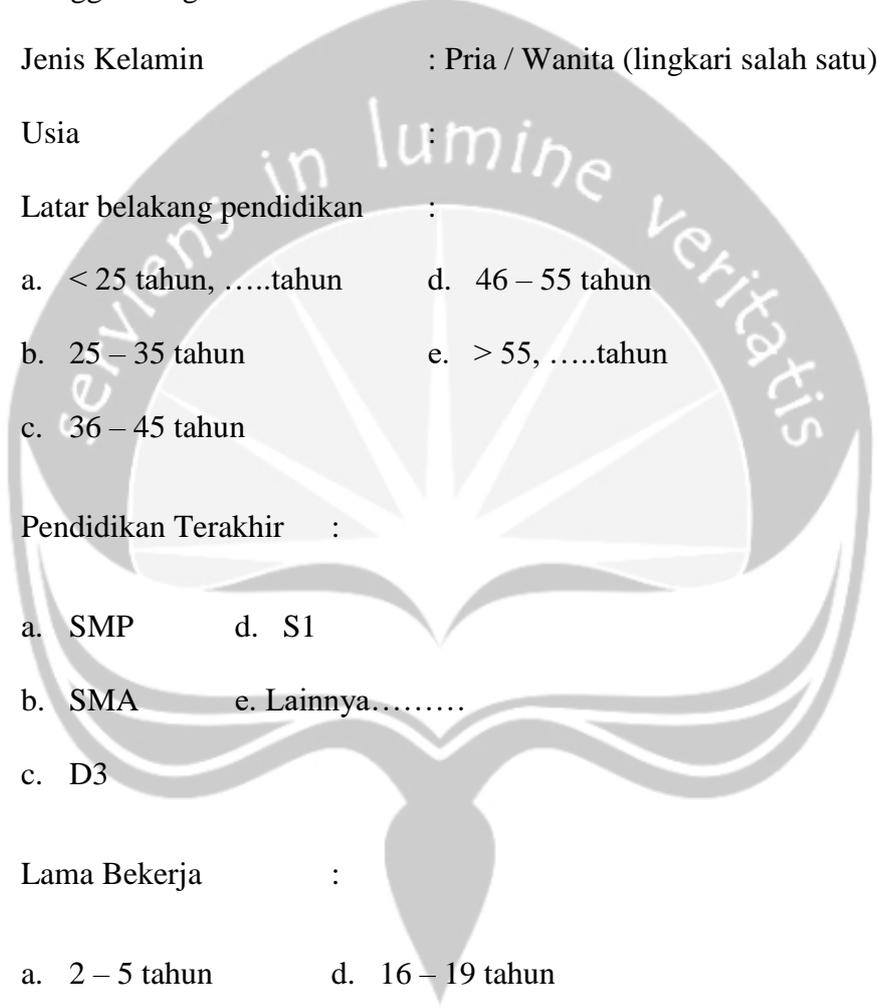
Atas ketersediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu mengisi kuesioner tersebut, saya ucapkan terima kasih banyak.

Mahasiswa

Julianita Berthilla Claudya

KUESIONER PENELITIAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

- Nama Responden :
- Jabatan :
- Lama menjabat :
- Tanggal Pengisian :
- Jenis Kelamin : Pria / Wanita (lingkari salah satu)
- Usia :
- Latar belakang pendidikan :
- a. < 25 tahun,tahun d. 46 – 55 tahun
- b. 25 – 35 tahun e. > 55,tahun
- c. 36 – 45 tahun
- Pendidikan Terakhir :
- a. SMP d. S1
- b. SMA e. Lainnya.....
- c. D3
- Lama Bekerja :
- a. 2 – 5 tahun d. 16 – 19 tahun
- b. 6 – 9 tahun e. \geq 20 tahun
- c. 10 – 15 tahun
- 

II. Pertanyaan Kuesioner

Terimakasih Bapak/Ibu Saudara/i telah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan ini, dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai dengan pernyataan — pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda (√).

Jika menurut Bapak/Ibu Saudara/i tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 s.d. 4, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pernyataan tersebut.

Keterangan	Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
Skor	1	2	3	4

Kuesioner ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama pernyataan mengenai *good governance* yang terdiri dari delapan belas butir pernyataan. Bagian kedua pernyataan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri dari sepuluh butir pernyataan. Bagian ketiga pernyataan mengenai akuntabilitas publik terdiri dari sembilan butir pernyataan. Bagian keempat pernyataan mengenai kinerja organisasi terdiri dari delapan butir pernyataan. Skor jawaban adalah sebagai berikut:

1. GOOD GOVERNANCE (X1)

<i>Good Governance</i> adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik. (Mardiasmo, 2009).					
No	Pernyataan	(1) STS	(2) TS	(3) S	(4) SS
Partisipasi					
1	Organisasi tempat saya bekerja membuka diri bagi masyarakat untuk memberikan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah.				
2	Seluruh pegawai di organisasi tempat saya bekerja memiliki peran yang aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari memberikan pendapat dan kritik.				
Tegaknya Supremasi Hukum					
3	Organisasi tempat saya bekerja menyusun peraturan daerah dan kebijakan publik lainnya demi kepentingan masyarakat.				
4	Organisasi tempat saya bekerja menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan telah dilaksanakan tanpa diskriminasi dan adanya benturan kepentingan.				
Transparansi					
5	Organisasi tempat saya bekerja dalam menyelenggarakan pemerintahannya segala proses dan tahapan penyusunan dilakukan secara tertib, aman, dan terbuka.				
6	Organisasi tempat saya bekerja menyediakan data dan informasi yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat diperoleh dengan mudah oleh pengguna informasi.				
Daya Tanggap					
7	Organisasi tempat saya bekerja terdapat sistem pengaduan masyarakat yang telah disusun dalam				

	rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.				
8	Organisasi tempat saya bekerja cepat dan tanggap menindaklanjuti kritik dan saran atas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.				
Berorientasi Pada Konsensus					
9	Rencana kerja di Organisasi tempat saya bekerja disusun berdasarkan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.				
10	Organisasi tempat saya bekerja membuat kebijakan dengan memperhatikan semua kepentingan masyarakat.				
Kesetaraan					
11	Organisasi tempat saya bekerja menyusun program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.				
12	Organisasi tempat saya bekerja memberikan bantuan finansial maupun non finansial yang dapat diperoleh masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.				
Efektivitas dan Efisiensi					
13	Tingkat keberhasilan pelaksanaan program di organisasi tempat saya bekerja telah sejalan dengan penyusunan APBD dan target.				
14	Penggunaan APBD pada organisasi tempat saya bekerja telah sesuai dengan alokasinya.				
Akuntabilitas					
15	Pertanggungjawaban kinerja pada organisasi tempat saya bekerja dilaksanakan secara periodik melalui laporan kinerja dan disampaikan tepat pada waktunya.				
16	Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada organisasi tempat saya bekerja telah berorientasi				

	pada prinsip akuntabilitas dengan menerapkan standar operasional yang berlaku.				
Visi Strategi					
17	Organisasi tempat saya bekerja menyusun visi dan misi yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan.				
18	APBD yang disusun dalam pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi tempat saya bekerja.				

2. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (X2)

SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. (PP No 60 tahun 2008).					
No	Pernyataan	(1) STS	(2) TS	(3) S	(4) SS
Lingkungan Pengendalian					
1	Organisasi tempat saya bekerja telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.				
2	Pada organisasi tempat saya bekerja pelanggaran terhadap SOP sudah diberikan peringatan atau teguran.				
Penilaian Resiko					
3	Organisasi tempat saya bekerja ada mekanisme untuk mengidentifikasi hambatan dalam pencapaian dari tujuan instansi.				

4	Organisasi tempat saya bekerja terdapat penentuan batas dan toleransi untuk risiko kesalahan.				
Kegiatan Pengendalian					
5	Pada organisasi tempat saya bekerja Setiap transaksi dan aktivitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah telah didukung dengan otorisasi dari pihak berwenang.				
6	Organisasi tempat saya bekerja telah menerapkan pemisahan tugas yang memadai				
Informasi dan Komunikasi					
7	Pada organisasi tempat saya bekerja informasi dikomunikasikan secara efektif antara bawahan, atasan maupun antar bagian.				
8	Organisasi tempat saya bekerja telah menyelenggarakan rapat pengendalian yang diikuti aparatur pemerintah secara berkala.				
Pemantauan					
9	Organisasi tempat saya bekerja telah melakukan evaluasi terhadap SOP dan pelaksanaanya secara berkala.				
10	Pemimpin dan atasan di organisasi tempat saya bekerja melakukan pemeriksaan secara berkala atau dadakan terhadap aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.				

3. AKUNTABILITAS PUBLIK (Z)

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2018).					
No	Pernyataan	(1) STS	(2) TS	(3) S	(4) SS
Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum					
1	Organisasi tempat saya bekerja akan bertanggung jawab terhadap informasi maupun pencapaian kinerja.				
2	Organisasi tempat saya bekerja akan menyajikan informasi maupun pencapaian kinerja kepada masyarakat.				
3	Organisasi tempat saya bekerja konsisten terhadap peraturan/hukum yang telah dibuat.				
Akuntabilitas Proses					
4	Organisasi saya bekerja melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.				
5	Setiap periode organisasi tempat saya bekerja menyusun dan mempertanggungjawabkan proses kegiatan yang akan dilakukan.				
Akuntabilitas Program					
6	Pimpinan/atasan dan para pegawai pada organisasi tempat saya bekerja secara bersama-sama mempertanggungjawabkan setiap proses dan hasil dari suatu program/kegiatan di instansi				
7	Pimpinan/atasan dan para pegawai pada organisasi tempat saya bekerja selalu terlibat bersama-sama dalam mengevaluasi hasil suatu program/kegiatan/proyek.				
Akuntabilitas Kebijakan					
8	Pimpinan/atasan dan para pegawai pada organisasi tempat saya bekerja mendiskusikan tentang kebijakan/peraturan sebelum diterapkan.				
9	Kebijakan/peraturan yang telah disepakati oleh pimpinan/atasan dan para pegawai pada organisasi tempat saya bekerja akan diterapkan di instansi pemerintah untuk dipatuhi.				

4. KINERJA ORGANISASI (Y)

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam skema strategi. (Bastian, 2009).

No	Pernyataan	(1) STS	(2) TS	(3) S	(4) SS
1	Aparatur pemerintah pada organisasi tempat saya bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.				
2	Aparatur pemerintah pada organisasi tempat saya bekerja aktif dalam menanggapi keluhan masyarakat.				
3	Aparatur pemerintah pada organisasi tempat saya bekerja bekerja dengan maksimal dalam menjalankan tugasnya.				
4	Aparatur pemerintah pada organisasi tempat saya bekerja memanfaatkan waktu bekerja dengan efektif (mencapai tujuan awal) dan efisien.				
5	Aparatur pemerintah pada organisasi tempat saya bekerja menekankan visi dan misi organisasi agar tujuan organisasi tercapai.				
6	Aparatur pemerintah pada organisasi tempat saya bekerja melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi pekerjaan.				
7	Aparatur pemerintah pada organisasi tempat saya bekerja dalam memberikan pelayanan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.				
8	Aparatur pemerintah pada organisasi tempat saya bekerja dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada atasan dan masyarakat.				

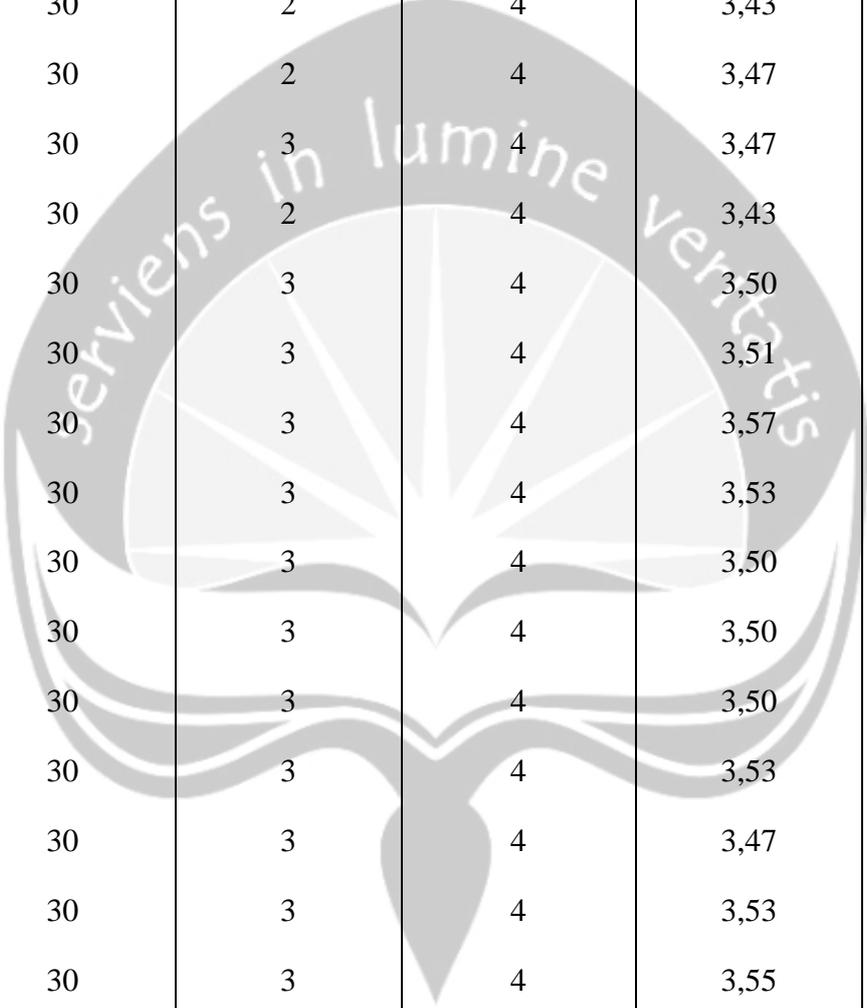
No	GG10	GG11	GG12	GG13	GG14	GG15	GG16	GG17	GG18
1	4	4	3	3	4	3	4	4	4
2	3	3	3	4	4	4	4	4	3
3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
4	3	3	3	4	4	4	4	4	4
5	3	3	3	4	4	3	4	3	3
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	3	3	3	3	4	3	3	4	3
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	3	4	4	4	4	4	4
13	3	4	4	4	3	4	4	4	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	4	4	3	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	3	4	4	4	4
20	4	3	4	3	4	4	3	4	4
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	3	4	3	3	3	3	3	3	3
26	3	4	4	4	4	4	4	4	4
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3
29	4	3	4	4	4	4	3	4	4
30	4	4	4	3	4	4	4	4	4

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (X2)

No	SPIP1	SPIP2	SPIP3	SPIP4	SPIP5	SPIP6	SPIP7	SPIP8	SPIP9	SPIP10
1	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4
2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4
11	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
13	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4
14	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
18	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4
19	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4
20	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4
21	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4
25	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GG1	30	3	4	3,68	0,497
GG2	30	3	4	3,64	0,498
GG3	30	3	4	3,67	0,496
GG4	30	3	4	3,66	0,495
GG5	30	3	4	3,60	0,493
GG6	30	3	4	3,63	0,490
GG7	30	3	4	3,60	0,498
GG8	30	3	4	3,57	0,504
GG9	30	3	4	3,57	0,504
GG10	30	3	4	3,60	0,498
GG11	30	3	4	3,63	0,490
GG12	30	3	4	3,61	0,491
GG13	30	3	4	3,57	0,504
GG14	30	3	4	3,60	0,498
GG15	30	3	4	3,63	0,490
GG16	30	3	4	3,57	0,504
GG17	30	3	4	3,60	0,498
GG18	30	3	4	3,69	0,492
SPIP1	30	3	4	3,60	0,498
SPIP2	30	3	4	3,69	0,499
SPIP3	30	3	4	3,62	0,495
SPIP4	30	3	4	3,60	0,498
SPIP5	30	3	4	3,63	0,490
SPIP6	30	3	4	3,50	0,509



SPIP7	30	3	4	3,57	0,504
SPIP8	30	3	4	3,60	0,498
SPIP9	30	3	4	3,57	0,504
SPIP10	30	3	4	3,60	0,498
AP1	30	3	4	3,53	0,507
AP2	30	3	4	3,47	0,507
AP3	30	2	4	3,43	0,626
AP4	30	2	4	3,47	0,571
AP5	30	3	4	3,47	0,507
AP6	30	2	4	3,43	0,568
AP7	30	3	4	3,50	0,509
AP8	30	3	4	3,51	0,507
AP9	30	3	4	3,57	0,504
KO1	30	3	4	3,53	0,507
KO2	30	3	4	3,50	0,509
KO3	30	3	4	3,50	0,509
KO4	30	3	4	3,50	0,507
KO5	30	3	4	3,53	0,507
KO6	30	3	4	3,47	0,507
KO7	30	3	4	3,53	0,507
KO8	30	3	4	3,55	0,509
Valid N (listwise)	30				

Lampiran 4 : Hasil Uji Reliabilitas dan Average Variances Extracted (AVE)

Composite reliab.	0.998	0.993	0.978	0.988
Cronbach's alpha	0.997	0.992	0.974	0.986
Avg. var. extrac.	0.960	0.933	0.832	0.909

Lampiran 5 : Hasil Uji Validitas Konvergen dan Validitas Diskriminan

	GG	SPIP	KO	AP
GG1	(0,991)	-0,057	0,001	0,058
GG2	(0,901)	0,436	0,003	-0,531
GG3	(0,905)	-0,042	0,002	0,094
GG4	(0,991)	-0,057	0,001	0,058
GG5	(0,854)	-0,066	0,023	0,057
GG6	(0,945)	0,385	-0,014	0,091
GG7	(0,899)	-0,041	0,030	0,004
GG8	(0,938)	-0,113	0,133	-0,122
GG9	(0,948)	-0,060	0,031	-0,042
GG10	(0,896)	-0,041	0,036	0,004
GG11	(0,845)	0,385	-0,014	-0,014
GG12	(0,898)	-0,041	0,036	0,000
GG13	(0,838)	-0,045	-0,006	-0,061
GG14	(0,995)	0,041	0,002	0,002
GG15	(0,899)	-0,041	0,030	0,000
GG16	(0,898)	-0,045	-0,061	-0,061
GG17	(0,899)	-0,041	0,030	0,002
GG18	(0,997)	-0,061	0,001	0,060
SPIP1	-0,041	(0,899)	0,022	0,004
SPIP2	-0,045	(0,938)	0,022	-0,006
SPIP3	0,044	(0,897)	0,022	-0,036
SPIP4	0,044	(0,897)	0,022	-0,036
SPIP5	-0,077	(0,843)	-0,044	-0,071
SPIP6	-0,146	(0,940)	0,031	0,208
SPIP7	-0,108	(0,846)	-0,141	0,220
SPIP8	0,044	(0,897)	0,022	-0,036
SPIP9	0,034	(0,941)	0,017	-0,103
SPIP10	0,044	(0,896)	0,022	-0,306
KO1	-0,057	0,058	(0,891)	0,004
KO2	-0,036	0,114	(0,954)	0,039
KO3	-0,094	0,064	(0,837)	-0,039
KO4	-0,057	0,058	(0,891)	0,004
KO5	0,436	-0,531	(0,801)	0,060
KO6	-0,042	0,094	(0,905)	-0,006
KO7	-0,057	0,058	(0,891)	0,004
KO8	-0,066	0,057	(0,954)	-0,063
AP1	0,257	-0,139	-0,026	(0,834)
AP2	0,105	-0,174	-0,061	(0,845)
AP3	0,214	-0,117	-0,027	(0,918)
AP4	0,029	-0,199	-0,128	(0,949)
AP5	-0,372	0,356	0,103	(0,836)
AP6	0,198	-0,213	0,002	(0,918)
AP7	0,182	-0,187	0,018	(0,938)
AP8	-0,282	0,491	0,008	(0,905)

AP9	-0,446	0,283	0,0143	(0,804)
------------	--------	-------	--------	----------------

Lampiran 6 : Hasil Koefisien Determinasi R-Square

	GG	SPIP	AP	KO
R-squared			0.506	0.181
Adj. R-squared			0.469	0.151

Lampiran 7 : Hasil Uji Goodness of Fit

Model fit and quality indices
 -----|
 Average path coefficient (APC)=0.694, P<0.001
 Average R-squared (ARS)=0.543, P<0.001
 Average adjusted R-squared (AARS)=0.310, P=0.014
 Average block VIF (AVIF)=2.474, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
 Average full collinearity VIF (AFVIF)=2.559, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
 Tenenhaus GoF (GoF)=0.558, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36

Lampiran 8 : Hasil Uji Path Coefficients dan P-Values

Path coefficients				
	GG	SPIP	AP	KO
GG				
SPIP				
AP	0.374	0.382		
KO			0.425	

P values				
	GG	SPIP	AP	KO
GG				
SPIP				
AP	0.010	0.009		
KO			0.004	



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG
Jl.Jenderal Sudirman No.12 Telp.(0534) 35741
KETAPANG 78813

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 365 /Disdukcapil-Sekrt.A

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, menerangkan bahwa :

Nama : Julianita Berthilla Claudya
No MHS / Prodi : 22833 / Akuntansi
No HP : 089696805648
Alamat : Jl. Perumnas GG.Brantas Dabag, Condongsari ,Condong Catur,
Depok, Sleman DIY 55281

Yang bersangkutan benar meminta data dan menyebar Kuisioner untuk penulisan skripsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan untuk penulisan skripsi.

Ketapang, 4 Mei 2020

KEPALA DINAS

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KETAPANG



MANSEN, SH, MH

Pembina Utama Muda

Nip. 19650705 199203 1 018